

TESIS

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BANJARBARU
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)**



Oleh:

SYAMSUDIN

NIM. 2320215310070

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BANJARBARU
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh:

SYAMSUDIN

NIM. 2320215310070

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Judul Tesis : PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BANJARBARU
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)

Nama : SYAMSUDIN

NIM : 2320215310070

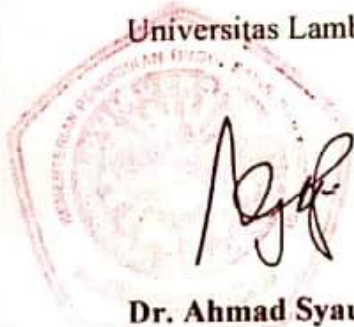

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 19600418 198603 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Ahmad Syaufi, S.H, M.H
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 08 Desember 2025**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 19600418 198603 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H, M.H
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 08 Desember 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

MOTO

خير الناس انفعهم للناس

Humble yourself, you'll grow greater than the world.

"Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya."

PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan **Kepada Ayah dan Ibu tercinta**. Dari kalian aku belajar bahwa kebaikan tidak selalu bersuara, dan pengorbanan tidak selalu meminta balasan. Terima kasih telah menjadi teladan tentang keteguhan hati, tentang kesabaran yang tidak lekang oleh waktu, dan tentang kasih yang terus mengalir tanpa syarat. Segala pencapaian ini sejatinya adalah pantulan dari cahaya budi yang kalian wariskan dalam diriku.*

Serta

Karya ini juga saya persembahkan kepada saudara (i) saya “Muhammad Yunus, Muhammad Yusuf, Juwairiah, Ahmad, Radi, Ramlah, dan Suliansyah” Kalian mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya sekumpulan nama, melainkan ruang belajar paling jujur tentang pengertian, ketulusan, dan penerimaan. Terima kasih telah menjadi penopang dalam diam, serta pengingat bahwa perjalanan hidup tak harus ditempuh sendirian. Semoga persembahan ini menjadi wujud syukurku atas hikmah yang kalian hadirkan dalam setiap bab kehidupanku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsudin
NIM : 2320215310070
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Syamsudin
NIM. 2320215310070

RINGKASAN

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Asas yang melandasi pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), menjadi dasar legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan yang menimbulkan sengketa, sebagaimana terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024.

Awalnya, terdapat dua pasangan calon, yakni Lisa Halaby-Wartono dan Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah. Namun, pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru pada 31 Oktober 2024. Akibatnya, Pilkada Banjarbaru hanya diikuti satu pasangan calon. KPU tetap menggunakan surat suara yang memuat dua pasangan calon, tetapi menetapkan suara untuk pasangan calon yang gugur sebagai suara tidak sah, tanpa mencantumkan kolom kosong sebagaimana diamanatkan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kondisi tersebut menimbulkan keberatan masyarakat karena hak pemilih untuk menolak calon tunggal secara sah diabaikan. Sengketa pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Mahkamah menilai tindakan KPU bertentangan dengan prinsip demokrasi serta merugikan hak konstitusional warga negara. Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dengan mencantumkan kolom kosong pada surat suara. Putusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak pilih rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menilai beberapa aspek penting:

1. Alat Bukti dan Fakta Persidangan: bukti utama yang dinilai signifikan adalah dokumen resmi KPU dan Bawaslu, seperti formulir rekapitulasi suara. Sementara itu, bukti elektronik seperti rekaman video dan tangkapan layar media sosial hanya dianggap sebagai pelengkap. MK menekankan keautentikan, relevansi, dan kekuatan pembuktian sebagai syarat utama.
2. Pertimbangan Hakim: hakim menegaskan bahwa tidak dicantumkannya kolom kosong pada surat suara dengan calon tunggal merupakan pelanggaran hukum

3. dan merugikan hak konstitusional pemilih. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54C UU Pilkada dan prinsip LUBER JURDIL.
4. Fakta Hukum yang Terbukti: Mahkamah menyatakan bahwa tindakan KPU mengabaikan hak rakyat untuk menolak calon tunggal secara sah. Fakta ini relevan dengan pokok sengketa dan cukup menjadi dasar bagi MK untuk memerintahkan pemungutan suara ulang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memiliki arti penting dalam praktik demokrasi Indonesia. Pertama, putusan ini mempertegas kewajiban negara untuk menyediakan alternatif pilihan bagi pemilih dalam kondisi calon tunggal. Kedua, putusan ini menegaskan peran MK bukan hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara.

Secara substantif putusan ini melindungi hak memilih sebagai elemen mendasar demokrasi. Dengan memerintahkan PSU, MK tidak hanya mengoreksi pelanggaran prosedural, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan secara sehat tanpa adanya mekanisme koreksi hukum yang adil.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional rakyat. Sengketa Pilkada Banjarbaru menjadi pelajaran penting bahwa kualitas demokrasi bergantung pada kesungguhan semua pihak dalam menegakkan hukum dan menghormati hak pilih rakyat.

SYAMSUDIN, 2025. PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BANJARBARU (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi, Hak Pilih, Kolom Kosong, Putusan MK, Demokrasi, Sengketa Pilkada.

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun demikian proses ini tidak selalu berjalan sesuai harapan, seperti yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2024. Dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) karena tidak adanya kolom kosong pada surat suara meskipun hanya ada satu pasangan calon, yang dinilai telah mengabaikan hak pemilih untuk menolak calon tersebut secara sah. Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan yuridis di balik pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menelaah dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah menilai tindakan KPU telah menyalahi prinsip pemilu yang jujur dan adil serta merugikan hak konstitusional warga negara. Putusan ini bukan hanya memberikan keadilan elektoral, tetapi juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak memilih sebagai elemen mendasar demokrasi, sehingga pemilu tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substansial bagi masyarakat.

ABSTRACT

Keywords: *Re-voting, Constitutional Court, Voting Rights, Blank Column, Constitutional Court Decision, Democracy, Pilkada Dispute.*

Regional head elections are a tangible manifestation of the implementation of popular sovereignty in the democratic system in Indonesia. However this process does not always go as expected, as happened in the Banjarbaru City Regional Election in 2024. In this case the Constitutional Court through Decision Number 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ordered a re-voting (PSU) due to the absence of an empty column on the ballot even though there was only one candidate pair, which was considered to have ignored the right of voters to legally reject the candidate. This study aims to examine the juridical reasoning behind the judge's consideration in the decision and examine its impact on the implementation of democratic elections. Using a normative legal approach with qualitative analysis of primary and secondary legal materials, this study found that the Court considered the KPU actions to have violated the principle of fair and honest elections and harmed the constitutional rights of citizens. This decision not only provides electoral justice, but also emphasizes the importance of respecting the right to vote as a fundamental element of democracy, so that elections are not only procedurally valid, but also substantially meaningful to society.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banjarbaru (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)”. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Kedua orang tua Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis.
7. Saudaraku yang selalu memberi semangat dalam suka dan duka “Muhammad Yunus, Muhammad Yusuf, Juwairiah, Ahmad, Radi, Ramlah, dan Suliansyah” saya ucapkan terimakasih.

8. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan Rekan-rekan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat diutarakan mudah-mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah SWT dengan balasan berlipat ganda. Akhirnya, segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang, dan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Desember 2025

Penyusun,



Syamsudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	36
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.....	45
A. Pertimbangan Hakim Terkait Alat Bukti dan Fakta Persidangan.....	45
B. Dasar Hukum dan Argumentasi Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus	
.....	59
BAB III KESESUAIAN DASAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
DENGAN PRINSIP KEADILAN PEMILU DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH	
WARGA NEGARA.....	77
A. Penilaian Terhadap Prinsip Keadilan Pemilu Pada Putusan MK	77
B. Penilaian Terhadap Perlindungan Hak Pilih.....	95
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	